

	News Title : Pemerintah Pilih Hati-Hati Jalankan Ekspor CPO Lewat Bursa Berjangka	
	Media Name : ddtc.co.id	Journalist : Redaksi DDTCNews
	Publish Date : 07 August 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Bursa CPO

Berita > Nasional

KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Pemerintah Pilih Hati-Hati Jalankan Ekspor CPO Lewat Bursa Berjangka

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Agustus 2023 | 12:00 WIB



Truk bermuatan kelapa sawit menuju pabrik Pirmata Bunda di Pematang Panggang, Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (7/7/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Implementasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) lewat bursa berjangka belum bisa dilaksanakan sampai kini. Padahal, kebijakan ini ditargetkan bisa berjalan Juni 2023.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan pemerintah memilih untuk berhati-hati dalam menyusun rancangan kebijakan ekspor CPO lewat bursa berjangka ini.

"Kami menjaga agar kebijakan dan ketentuan yang tengah disusun tidak bertabrakan. Pemerintah sudah menyusun 3 rancangan kebijakan dan ketentuan teknis terkait dengan bursa berjangka," kata Didid dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (7/8/2023).

Baca Juga: Realisasi DHE SDA Tergantung Kepatuhan Eksportir, Begini Proyeksi BI

Ketiga ketentuan teknis tersebut, antara lain, *pertama*, dituangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 50/2022. *Kedua*, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah. *Ketiga*, Rancangan Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik CPO.

Saat ini, Kementerian Perdagangan telah merampungkan telaah hukum atas rancangan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Dalam waktu dekat, rancangan kebijakan ini akan masuk harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Didid menekankan ada sejumlah manfaat kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. *Pertama*, terbentuk harga acuan (*price reference*) CPO yang transparan, akuntabel, dan *real time*.

Baca Juga: UMKM Bisa Sukarela Parkir DHE SDA di Dalam Negeri dan Dapat Insentif

Kondisi saat ini perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar sehingga menjadi tidak transparan, tidak *real time*, dan sering menimbulkan *under pricing*.

"Perdagangan CPO di Indonesia saat ini masih mengacu pada harga referensi dari bursa Malaysia dan Rotterdam. Padahal, Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar dunia," kata Didid.

Manfaat *kedua*, Harga Patokan Ekspor (HPE) dapat ditetapkan dengan jelas dan penerimaan negara dari pajak akan meningkat. *Ketiga*, dapat mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian dan menjadikan harga acuan biodiesel oleh Kementerian ESDM. (sap)